AKUNTANSI 45
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS 45 SURABAYA
Jurnal Ilmiah Akuntansi

Literasi Publik, Pengetahuan Mahasiswa terhadap Penilaian Transparansi *Website* Pemerintah Daerah dengan Kemampuan Digital sebagai Pemoderasi

Public Literacy, Students' Knowledge of Transparency Assessment of Local Government Websites with Digital Skills as Moderators

Hurian Kamela[1*], Dede Puspa Pujia[2], Adibah Yahya[3], Yusiresita Pajaria[4], Ryan Saputra Alam[5]
[1]Universitas Terbuka, Indonesia
[2]Universitas Tangerang Raya, Indonesia
[3]Universitas Pelita Bangsa, Indonesia
[4]Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Indonesia
[5]STIE Mulia Pratama, Indonesia

*Penulis Korespondensi: hurian.kamela@ecampus.ut.ac.id

Abstract. *Transparency of local government websites is a form of public information disclosure that supports accountability and good governance. However, the availability of information on government websites does not necessarily guarantee that the public, particularly university students, are able to understand and assess the transparency of the information provided. This study aims to analyze the effects of public literacy and students' knowledge on the assessment of local government website transparency, with digital competence serving as a moderating variable. This study employs a quantitative approach using a survey method involving 84 respondents from the Greater Jakarta (Jabodetabek) area. The selection of this area is based on the consideration that university students in Jabodetabek have knowledge of or experience in accessing local government websites. Respondents were selected using purposive sampling, while the research variables were measured using a Likert scale. The data were analyzed using linear regression analysis. The findings are expected to reveal the relationships between public literacy and students' knowledge and the assessment of local government website transparency, as well as explain the role of digital competence in strengthening or weakening these relationships. This study is expected to provide theoretical contributions to the development of public financial accounting and government transparency research, as well as practical implications for local governments in improving the quality of financial and non-financial information disclosure through their official websites. Furthermore, the findings are expected to provide insights for higher education institutions in enhancing students' public literacy and digital competence so that they can critically evaluate government information disclosure.*

Keywords: *Digital Competence; Local Government; Public Literacy; Students' Knowledge; Website Transparency.*

Abstrak. Transparansi *website* pemerintah daerah merupakan salah satu bentuk keterbukaan informasi publik yang mendukung akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik. Namun, ketersediaan informasi pada website pemerintah belum tentu menjamin bahwa masyarakat, khususnya mahasiswa, mampu memahami dan menilai transparansi informasi yang disajikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh literasi publik dan pengetahuan mahasiswa terhadap penilaian transparansi *website* pemerintah daerah dengan kemampuan digital sebagai variabel moderasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei sebanyak 84 responden di wilayah Jabodetabek. Alasannya karena mahasiswa di wilayah Jabodetabek memiliki pengetahuan atau pengalaman dalam mengakses *website* pemerintah daerah. Pengambilan sampel dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling*, sedangkan pengukuran variabel menggunakan skala Likert. Data dianalisis menggunakan regresi linear. Hasil penelitian diharapkan dapat menunjukkan hubungan literasi publik dan pengetahuan mahasiswa dengan penilaian transparansi *website* pemerintah daerah serta menjelaskan peran kemampuan digital dalam memperkuat atau memperlemah hubungan tersebut. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian akuntansi keuangan publik dan transparansi pemerintahan serta implikasi praktis bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas penyajian informasi keuangan dan nonkeuangan melalui *website* resmi. Hasil penelitian juga diharapkan menjadi masukan bagi perguruan tinggi dalam meningkatkan literasi publik dan kompetensi digital mahasiswa agar mampu mengevaluasi keterbukaan informasi pemerintah secara kritis.

Kata kunci: Kemampuan Digital; Literasi Publik; Pemerintah Daerah; Pengetahuan Mahasiswa; Transparansi *Website*.

Naskah Masuk: 15 Agustus 2026; Revisi: 25 September 2026; Diterima: 09 November 2026; Terbit: 26 November 2026

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam penyediaan informasi kepada masyarakat. Pengungkapan informasi APBD menjadi penting karena mencerminkan transparansi pemerintah dalam merencanakan dan merealisasikan penggunaan anggaran yang bersumber dari dana publik. Selain itu, publikasi laporan keuangan pemerintah daerah melalui *website* resmi merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya keuangan daerah yang harus dapat diakses dan dipahami oleh masyarakatKualitas pengungkapan informasi APBD dan laporan keuangan pada *website* pemerintah daerah menjadi salah satu indikator penting dalam menilai transparansi serta memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah daerah semakin memanfaatkan *website* resmi sebagai sarana untuk menyampaikan informasi mengenai kebijakan, program kerja, pengelolaan anggaran, serta pertanggungjawaban keuangan daerah (Mujiyani & Safitri, 2025; Saputra & Korompot, 2026). Pemanfaatan teknologi tersebut diharapkan dapat meningkatkan keterbukaan informasi publik dan memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Pada konteks akuntansi sektor publik, transparansi merupakan salah satu prinsip penting karena masyarakat memiliki kepentingan untuk mengetahui bagaimana sumber daya publik diperoleh, dialokasikan, digunakan, dan dipertanggungjawabkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, keberadaan *website* pemerintah daerah tidak hanya berfungsi sebagai media komunikasi, tetapi juga sebagai sarana pengungkapan informasi yang mendukung pengawasan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah. Transparansi *website* pemerintah daerah menjadi penting karena masyarakat membutuhkan akses terhadap informasi yang relevan, akurat, lengkap, dan mudah dipahami. Informasi tersebut dapat mencakup Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), laporan keuangan pemerintah daerah, realisasi anggaran, pendapatan asli daerah, belanja daerah, serta program pembangunan yang dibiayai menggunakan dana publik. Ketersediaan informasi melalui *website* dapat membantu masyarakat menilai kesesuaian antara perencanaan anggaran dan pelaksanaan program pemerintah (Ni'mah, N., Fabriar, S. R., Fitri, A. N., & Pangestu, 2026). Namun, keberadaan *website* tidak secara otomatis menunjukkan bahwa transparansi telah terlaksana secara optimal. Informasi yang tidak lengkap, sulit ditemukan, kurang diperbarui, atau disajikan dalam format yang sulit dipahami dapat menghambat masyarakat dalam memperoleh gambaran mengenai pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, penilaian transparansi *website* pemerintah daerah perlu memperhatikan bukan hanya ketersediaan informasi, tetapi juga kualitas pengungkapan dan kemudahan masyarakat dalam memahami informasi tersebut.

Literasi publik merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi cara masyarakat memahami dan menilai keterbukaan informasi pemerintah. Literasi publik difokuskan pada pemahaman individu mengenai hak memperoleh informasi publik, fungsi keterbukaan informasi, serta pemanfaatan informasi sebagai sarana partisipasi dan pengawasan terhadap pemerintah. Aspek tersebut berbeda dengan pengetahuan mahasiswa yang lebih menekankan pada pemahaman substantif mengenai pengelolaan keuangan daerah, seperti APBD, laporan keuangan pemerintah daerah, alokasi anggaran, dan pertanggungjawaban keuangan publik. Sementara itu, kemampuan digital berkaitan dengan keterampilan individu dalam mengakses, menelusuri, menggunakan, dan mengevaluasi informasi yang tersedia melalui *website* resmi pemerintah daerah. Berdasarkan penelitian ini, literasi publik dapat dipahami sebagai kemampuan individu untuk mengenali hak atas informasi publik, memahami fungsi keterbukaan informasi, serta menyadari pentingnya partisipasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan (Subhan, A., Kurnia, 2026). Individu yang memiliki literasi publik yang baik diharapkan lebih mampu mengenali informasi yang relevan, memahami manfaat pengungkapan informasi pemerintah, dan menilai apakah informasi yang tersedia telah memenuhi kebutuhan masyarakat. Sebaliknya, keterbatasan literasi publik dapat menyebabkan informasi yang sebenarnya telah dipublikasikan tidak dimanfaatkan secara optimal.

Perspektif akuntansi publik, literasi publik menjadi relevan karena keterbukaan laporan keuangan pemerintah tidak hanya bergantung pada tindakan pemerintah dalam menyediakan informasi, tetapi juga pada kemampuan masyarakat untuk memahami arti penting informasi tersebut bagi akuntabilitas pengelolaan dana publik. Selain literasi publik, pengetahuan mahasiswa juga menjadi aspek penting dalam penilaian transparansi *website* pemerintah daerah. Mahasiswa merupakan bagian dari masyarakat yang dapat berperan sebagai pengguna informasi, pengamat kebijakan publik, dan pihak yang memberikan perhatian terhadap akuntabilitas pemerintah. Pengetahuan mahasiswa mengenai pemerintahan, akuntansi sektor publik, penganggaran, dan pelaporan keuangan dapat membantu memahami informasi yang disajikan melalui *website* pemerintah daerah (Imansyah, 2025). Mahasiswa yang memiliki pengetahuan memadai diharapkan mampu membedakan informasi administratif dengan informasi keuangan, mengenali jenis dokumen yang diperlukan untuk menilai pertanggungjawaban anggaran, serta mengevaluasi kecukupan informasi yang dipublikasikan. Meskipun demikian, tingkat pengetahuan yang dimiliki mahasiswa belum tentu menghasilkan penilaian transparansi yang sama karena penilaian tersebut juga dapat dipengaruhi oleh pengalaman mengakses informasi, kemampuan memahami dokumen digital, dan karakteristik

informasi yang disediakan pemerintah daerah. Oleh sebab itu, hubungan antara pengetahuan mahasiswa dan penilaian transparansi *website* pemerintah daerah penting untuk dikaji secara empiris.

Kemampuan digital diduga menjadi faktor yang dapat menjelaskan perbedaan penilaian mahasiswa terhadap transparansi *website* pemerintah daerah (Nadila et al., 2026). Kemampuan digital tidak hanya berkaitan dengan keterampilan menggunakan perangkat teknologi, tetapi juga mencakup kemampuan mencari informasi, menavigasi website, mengevaluasi kredibilitas sumber, memahami penyajian informasi digital, dan memanfaatkan informasi secara tepat. Pada konteks penelitian ini, mahasiswa yang memiliki kemampuan digital tinggi berpotensi lebih mudah menemukan dokumen anggaran, mengakses laporan keuangan, serta menilai kelengkapan dan kejelasan informasi yang dipublikasikan. Sebaliknya, mahasiswa dengan kemampuan digital terbatas mungkin mengalami kesulitan menemukan dokumen yang diperlukan meskipun informasi tersebut sebenarnya tersedia. Dengan demikian, kemampuan digital berpotensi memengaruhi efektivitas pemanfaatan literasi publik dan pengetahuan mahasiswa dalam melakukan penilaian transparansi *website* pemerintah daerah (Samsinar & Saputri, 2025).

Kedudukan kemampuan digital sebagai variabel moderasi menjadi menarik karena kemampuan tersebut tidak hanya dapat dikaji sebagai faktor yang berdiri sendiri, tetapi juga sebagai faktor yang berpotensi mengubah kekuatan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Sejumlah penelitian empiris mengenai literasi digital dan pemanfaatan informasi berbasis teknologi menunjukkan bahwa kemampuan digital dapat memperkuat hubungan antara pengetahuan individu dan kemampuan dalam mengevaluasi informasi yang tersedia secara daring (Irawaty, 2025). Dalam konteks penelitian ini, kemampuan digital dihipotesiskan memiliki arah moderasi positif, yaitu memperkuat pengaruh literasi publik dan pengetahuan mahasiswa terhadap penilaian transparansi *website* pemerintah daerah. Dengan demikian, semakin tinggi kemampuan digital, semakin besar potensi literasi publik dan pengetahuan mengenai keuangan daerah untuk digunakan dalam mengidentifikasi, memahami, serta mengevaluasi keterbukaan informasi keuangan pemerintah daerah (Arjang & Kraugusteeliana, 2025).

Mahasiswa yang memiliki literasi publik tinggi, misalnya, mungkin lebih mampu menilai transparansi apabila didukung kemampuan digital yang memadai untuk menemukan dan mengevaluasi informasi pemerintah(Rochmanto & Utami, 2026). Demikian pula, pengetahuan mahasiswa mengenai akuntansi sektor publik mungkin lebih bermanfaat dalam menilai transparansi ketika mahasiswa mampu mengakses dan memahami dokumen keuangan yang

tersedia secara daring. Sebaliknya, kemampuan digital yang terbatas berpotensi menghambat penerapan pengetahuan tersebut dalam proses penilaian. Atas dasar itu, penelitian ini menempatkan kemampuan digital sebagai variabel moderasi untuk menguji apakah kemampuan digital memperkuat atau memperlemah hubungan literasi publik dan pengetahuan mahasiswa dengan penilaian transparansi *website* pemerintah daerah. Arah dan kekuatan hubungan moderasi tersebut perlu dibuktikan melalui pengujian empiris, bukan diasumsikan sejak awal.

Meskipun pemanfaatan *website* pemerintah daerah semakin relevan dalam mendukung keterbukaan informasi, masih terdapat ruang penelitian untuk memahami bagaimana karakteristik pengguna memengaruhi penilaian atas transparansi yang disediakan. Penelitian mengenai transparansi pemerintah dapat berfokus pada ketersediaan informasi atau tingkat pengungkapan dokumen yang dipublikasikan, sedangkan penelitian dari perspektif pengguna dapat memberikan pemahaman mengenai bagaimana informasi tersebut dinilai oleh masyarakat. Perbedaan antara transparansi aktual dan persepsi transparansi juga penting diperhatikan. *Website* yang memuat dokumen keuangan secara lengkap belum tentu dinilai transparan oleh seluruh pengguna apabila dokumen sulit ditemukan atau sulit dipahami (Yulianto & Muqsith, 2026). Sebaliknya, penilaian positif pengguna tidak selalu membuktikan bahwa seluruh informasi keuangan yang diwajibkan telah diungkapkan.

Penelitian terdahulu mengenai transparansi *website* pemerintah daerah umumnya lebih banyak berfokus pada tingkat pengungkapan informasi keuangan, kepatuhan pemerintah terhadap regulasi keterbukaan informasi, serta kualitas penyajian laporan keuangan saja (Aji, 2025). Sementara itu, penelitian yang mengkaji transparansi *website* pemerintah daerah dari perspektif pengguna, khususnya dengan membandingkan peran literasi publik dan pengetahuan mahasiswa sebagai faktor yang memengaruhi penilaian transparansi, masih perlu dikembangkan (Subhan, A., Kurnia, 2026). Selain itu, penelitian ini memberikan perspektif yang berbeda dengan menempatkan kemampuan digital sebagai variabel moderasi untuk menguji apakah keterampilan mahasiswa dalam mengakses dan mengevaluasi informasi daring dapat memperkuat hubungan antara literasi publik dan pengetahuan mahasiswa dengan penilaian transparansi *website* pemerintah daerah. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya memberikan kontribusi dengan menguji keterkaitan literasi publik dan pengetahuan mahasiswa terhadap penilaian transparansi *website* pemerintah daerah serta menganalisis peran kemampuan digital sebagai variabel moderasi. Kebaruan penelitian perlu diperkuat melalui penelusuran penelitian terdahulu agar dapat ditunjukkan secara jelas aspek yang belum banyak dikaji.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh literasi publik dan pengetahuan mahasiswa terhadap penilaian transparansi *website* pemerintah daerah serta menguji kemampuan digital sebagai variabel moderasi. Secara lebih khusus, penelitian ini menguji pengaruh literasi publik terhadap penilaian transparansi *website* pemerintah daerah (H1) dan pengaruh pengetahuan mahasiswa terhadap penilaian transparansi *website* pemerintah daerah (H2). Selanjutnya, penelitian ini menguji kemampuan digital dalam memoderasi hubungan antara literasi publik dan penilaian transparansi *website* pemerintah daerah (H3), serta hubungan antara pengetahuan mahasiswa dan penilaian transparansi *website* pemerintah daerah (H4). Pengujian keempat hipotesis tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penilaian mahasiswa terhadap transparansi informasi pemerintah daerah melalui media digital.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian akuntansi keuangan publik, khususnya mengenai transparansi informasi keuangan pemerintah dan peran masyarakat dalam memahami informasi yang dipublikasikan secara digital (Faujiah, 2025). Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pengungkapan informasi, memperbaiki kemudahan akses website, dan menyajikan informasi keuangan dalam format yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya literasi publik, pengetahuan mahasiswa, dan kemampuan digital dalam mendukung pemanfaatan informasi keuangan pemerintah. Dengan demikian, transparansi *website* pemerintah daerah diharapkan tidak hanya dinilai dari keberadaan informasi yang dipublikasikan, tetapi juga dari sejauh mana informasi tersebut dapat diakses, dipahami, dan dimanfaatkan untuk mendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan publik.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Stakeholder (*Stakeholder Theory*)

Teori Stakeholder (*Stakeholder Theory*) merupakan teori yang menjelaskan bahwa organisasi perlu memperhatikan kepentingan berbagai pihak yang memiliki hubungan atau kepentingan terhadap aktivitas organisasi. Berdasarkan perspektif individu, kemampuan seseorang dalam memahami dan memanfaatkan informasi digital dapat dijelaskan melalui pendekatan literasi digital, yang menekankan pentingnya keterampilan dalam mengakses, memahami, mengevaluasi, dan menggunakan informasi berbasis teknologi (Subhan, A., Kurnia, 2026). Kemampuan digital tersebut menjadi faktor yang memungkinkan individu menerapkan literasi publik dan pengetahuan yang dimiliki untuk menilai kualitas serta

keterbukaan informasi yang disediakan oleh organisasi pemerintah (Rochmanto & Utami, 2026). Kemampuan digital dapat berperan sebagai faktor moderasi karena semakin tinggi keterampilan digital individu, semakin kuat kemampuan literasi publik dan pengetahuan mahasiswa dalam memengaruhi penilaian transparansi *website* pemerintah daerah. Freeman (1984) menjelaskan bahwa stakeholder mencakup pihak-pihak yang dapat memengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi.

Berdasarkan konteks pemerintahan daerah, masyarakat merupakan stakeholder yang memiliki kepentingan terhadap pengelolaan sumber daya publik, penggunaan anggaran, dan pertanggungjawaban pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu menyediakan informasi yang relevan, transparan, dan mudah diakses melalui *website* resmi sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan informasi publik. Dalam penelitian ini, literasi publik dan pengetahuan mahasiswa menjadi faktor yang dapat memengaruhi kemampuan mahasiswa dalam memahami serta menilai keterbukaan informasi pemerintah daerah. Literasi publik membantu mahasiswa memahami pentingnya transparansi dan hak atas informasi, sedangkan pengetahuan mahasiswa mendukung kemampuan dalam mengenali dan mengevaluasi informasi yang disajikan pada *website* pemerintah daerah (Wibowo, 2026). Selanjutnya, kemampuan digital sebagai variabel moderasi dapat dijelaskan melalui perspektif Teori Stakeholder karena pemenuhan kebutuhan informasi tidak hanya bergantung pada ketersediaan informasi, tetapi juga pada kemampuan pengguna untuk mengakses dan memanfaatkannya.

Mahasiswa yang memiliki kemampuan digital memadai berpotensi lebih mudah menemukan, memahami, dan mengevaluasi informasi yang tersedia pada *website* pemerintah daerah, termasuk informasi anggaran dan laporan keuangan. Kemampuan tersebut diperkirakan dapat memperkuat hubungan antara literasi publik dan pengetahuan mahasiswa dengan penilaian transparansi *website* pemerintah daerah (Setiabuyung & Bertho, 2025). Sebaliknya, keterbatasan kemampuan digital dapat menghambat pemanfaatan pengetahuan dalam menilai keterbukaan informasi. Dengan demikian, Teori Stakeholder menjadi landasan untuk menjelaskan pentingnya transparansi dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat, sedangkan kemampuan digital diuji sebagai variabel moderasi untuk mengetahui apakah kemampuan tersebut memperkuat atau memperlemah hubungan literasi publik dan pengetahuan mahasiswa terhadap penilaian transparansi *website* pemerintah daerah.

Literasi Publik

Literasi publik merupakan kemampuan individu dalam memahami informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, hak masyarakat atas informasi, serta pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya publik. Secara

operasional, literasi publik dalam penelitian ini diukur melalui beberapa dimensi, yaitu pemahaman terhadap hak memperoleh informasi publik, pemahaman mengenai fungsi transparansi dan akuntabilitas pemerintah, serta kemampuan memanfaatkan informasi publik untuk mendukung partisipasi dan pengawasan masyarakat. Indikator tersebut dapat dijabarkan dalam butir kuesioner, seperti pemahaman mahasiswa mengenai hak mengakses informasi APBD, kesadaran terhadap pentingnya publikasi laporan keuangan pemerintah daerah, dan pemahaman mengenai penggunaan informasi keuangan sebagai sarana pengawasan terhadap pengelolaan dana publik.

Pengukuran literasi publik berfokus pada aspek pengetahuan dan pemahaman mengenai hak serta substansi keterbukaan informasi, sedangkan kemampuan digital lebih menekankan keterampilan teknis dalam mengakses, menelusuri, dan mengevaluasi informasi melalui media digital. Literasi publik berkaitan dengan pemahaman masyarakat mengenai anggaran pemerintah daerah, laporan keuangan, realisasi belanja, dan penggunaan dana publik. Literasi publik yang baik dapat membantu masyarakat memahami bagaimana pemerintah mengelola sumber daya keuangan serta mempertanggungjawabkan penggunaannya kepada publik (Prakasa & Darmawan, 2025). Oleh karena itu, *website* pemerintah daerah memiliki peran penting sebagai media penyediaan informasi yang memungkinkan masyarakat memperoleh informasi mengenai pengelolaan keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan secara lebih terbuka.

Literasi publik menjadi variabel independen yang diperkirakan memengaruhi penilaian mahasiswa terhadap transparansi *website* pemerintah daerah. Mahasiswa yang memiliki literasi publik yang baik diharapkan mampu memahami pentingnya keterbukaan informasi, mengenali informasi yang relevan, serta menilai kelengkapan dan kejelasan informasi yang dipublikasikan oleh pemerintah daerah. Hubungan tersebut juga berpotensi dipengaruhi oleh kemampuan digital sebagai variabel moderasi, karena kemampuan mencari, mengakses, dan mengevaluasi informasi secara digital dapat membantu mahasiswa memanfaatkan literasi publiknya ketika menilai transparansi *website* pemerintah daerah (Sukmawati, 2025). Dengan demikian, penelitian ini menguji apakah kemampuan digital memperkuat atau memperlemah hubungan antara literasi publik dan penilaian transparansi *website* pemerintah daerah, khususnya dalam penyediaan informasi yang mendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan publik.

Pengetahuan Mahasiswa

Pengetahuan mahasiswa merupakan tingkat pemahaman yang dimiliki mahasiswa mengenai penyelenggaraan pemerintahan, keterbukaan informasi publik, serta pengelolaan

keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan penelitian ini, pengetahuan mahasiswa diukur menggunakan pendekatan persepsi diri (*self-assessed knowledge*) melalui kuesioner dengan skala Likert lima poin untuk mengetahui tingkat pemahaman mahasiswa terhadap konsep dan praktik pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Pengukuran ini mencakup persepsi mahasiswa mengenai pemahamannya terhadap APBD, laporan keuangan pemerintah daerah, realisasi anggaran, serta prinsip transparansi dan akuntabilitas keuangan publik. Pendekatan persepsi diri digunakan untuk menggambarkan tingkat pengetahuan yang dirasakan oleh mahasiswa, meskipun hasil pengukurannya tidak secara langsung menunjukkan kemampuan objektif mahasiswa dalam menjawab pertanyaan atau menyelesaikan permasalahan terkait keuangan daerah. Pengetahuan tersebut dapat diperoleh melalui proses pembelajaran di perguruan tinggi, pengalaman akademik, maupun akses terhadap berbagai sumber informasi.

Berdasarkan konteks Akuntansi Publik, pengetahuan mahasiswa mencakup pemahaman mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), laporan keuangan pemerintah daerah, realisasi anggaran, serta prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik. Pengetahuan tersebut penting karena dapat membantu mahasiswa memahami tujuan penyajian informasi keuangan pemerintah dan menilai informasi yang tersedia telah disampaikan secara jelas, lengkap, dan mudah diakses oleh masyarakat (Aji, 2025). Dengan demikian, pengetahuan mahasiswa menjadi salah satu aspek yang relevan dalam menilai transparansi *website* pemerintah daerah sebagai sarana penyediaan informasi publik.

Pengetahuan mahasiswa berperan sebagai variabel independen yang diperkirakan memengaruhi penilaian transparansi *website* pemerintah daerah. Mahasiswa yang memiliki pengetahuan memadai mengenai pemerintahan dan akuntansi sektor publik diharapkan lebih mampu mengidentifikasi informasi yang diperlukan, memahami isi dokumen keuangan, serta mengevaluasi keterbukaan informasi yang dipublikasikan melalui *website* resmi pemerintah daerah. Hubungan tersebut dapat dipengaruhi oleh kemampuan digital sebagai variabel moderasi, karena keterampilan dalam mencari, mengakses, dan mengevaluasi informasi digital dapat membantu mahasiswa menerapkan pengetahuannya secara lebih efektif. Mahasiswa yang memiliki pengetahuan baik tetapi mengalami kesulitan menggunakan *website* mungkin tidak dapat menilai transparansi secara optimal. Oleh karena itu, penelitian ini menguji apakah kemampuan digital memperkuat atau memperlemah hubungan antara pengetahuan mahasiswa dan penilaian transparansi *website* pemerintah daerah.

Penilaian Transparansi *Website* Pemerintah Daerah

Penilaian transparansi *website* pemerintah daerah merupakan proses evaluasi yang dilakukan oleh pengguna informasi untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah

menyediakan informasi publik secara terbuka, lengkap, jelas, dan mudah diakses melalui *website* resmi. Penilaian transparansi *website* pemerintah daerah diukur berdasarkan persepsi mahasiswa sebagai responden terhadap keterbukaan, kelengkapan, kejelasan, dan kemudahan akses informasi yang disajikan melalui *website* resmi pemerintah daerah, sehingga hasil pengukuran tidak dimaksudkan sebagai audit atau penilaian objektif atas tingkat kepatuhan pengungkapan informasi pemerintah. Untuk menjaga keseragaman penilaian, responden diarahkan untuk mengamati dan mengevaluasi *website* resmi pemerintah daerah yang telah ditentukan oleh peneliti berdasarkan aspek ketersediaan informasi APBD, laporan keuangan, realisasi anggaran, serta informasi pertanggungjawaban keuangan daerah. Seluruh responden diberikan petunjuk dan standar penilaian yang sama melalui kuesioner berskala Likert lima poin, sehingga penilaian didasarkan pada aspek transparansi yang seragam meskipun dilakukan oleh individu dengan tingkat literasi dan pengetahuan yang berbeda.

Dalam konteks Akuntansi Keuangan Publik, transparansi *website* pemerintah daerah berkaitan dengan keterbukaan informasi mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), laporan keuangan pemerintah daerah, realisasi anggaran, pendapatan dan belanja daerah, serta informasi lain yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik. *Website* pemerintah daerah berfungsi sebagai media komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menyampaikan informasi mengenai pengelolaan keuangan serta pelaksanaan program pembangunan (Vike, 2026). Oleh karena itu, penilaian transparansi tidak hanya didasarkan pada keberadaan *website*, tetapi juga mempertimbangkan ketersediaan, kelengkapan, kemutakhiran, kejelasan, dan kemudahan akses terhadap informasi yang dipublikasikan.

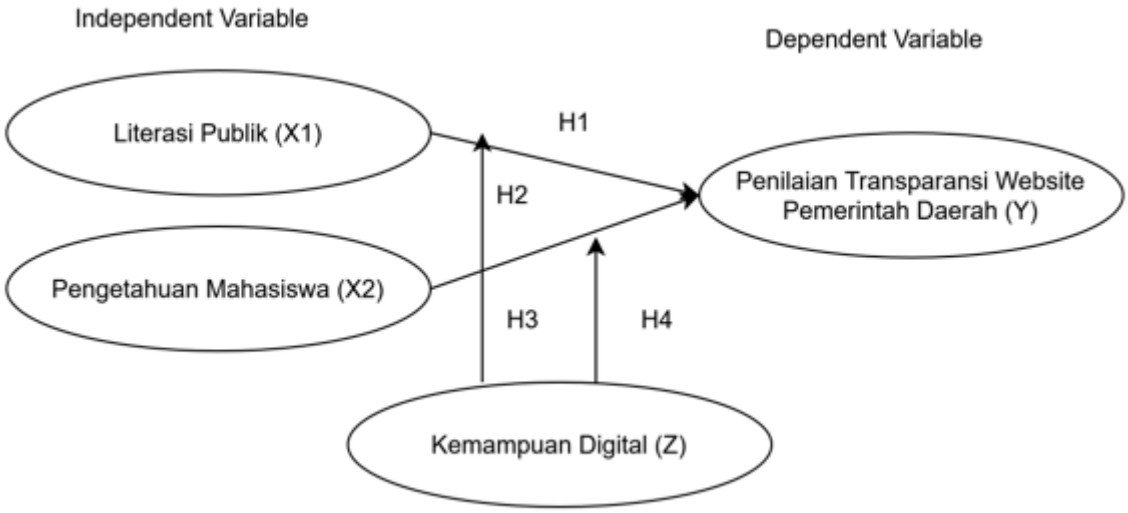
Pada penelitian ini, penilaian transparansi *website* pemerintah daerah berperan sebagai variabel dependen yang diperkirakan dipengaruhi oleh literasi publik dan pengetahuan mahasiswa, dengan kemampuan digital sebagai variabel moderasi. Mahasiswa yang memiliki literasi publik dan pengetahuan mengenai pemerintahan serta akuntansi sektor publik diharapkan mampu menilai keterbukaan informasi pemerintah secara lebih terarah. Namun, kemampuan tersebut dapat dipengaruhi oleh keterampilan mahasiswa dalam mencari, mengakses, memahami, dan mengevaluasi informasi digital. Kemampuan digital yang memadai berpotensi membantu untuk menemukan dokumen keuangan dan menilai kualitas informasi yang tersedia pada *website* pemerintah daerah, sedangkan keterbatasan kemampuan digital dapat menghambat proses penilaian tersebut (Daud, 2026). Dengan demikian, penelitian ini berupaya menganalisis bagaimana literasi publik dan pengetahuan mahasiswa berhubungan dengan penilaian transparansi *website* pemerintah daerah serta menguji peran kemampuan digital dalam memperkuat atau memperlemah hubungan tersebut.

Kemampuan Digital

Kemampuan digital merupakan kemampuan individu dalam menggunakan teknologi digital untuk mencari, mengakses, memahami, mengevaluasi, dan memanfaatkan informasi yang tersedia melalui internet. Secara operasional, kemampuan digital dalam penelitian ini diukur melalui beberapa dimensi, yaitu keterampilan mengakses informasi digital, kemampuan menelusuri dan menemukan informasi yang relevan, kemampuan mengevaluasi kredibilitas sumber informasi, serta kemampuan memahami dan menggunakan informasi dalam format digital (Yulianto & Muqsith, 2026). Indikator tersebut dapat diadaptasi dari kerangka kompetensi digital pada penelitian sebelumnya khususnya dimensi literasi informasi dan data, komunikasi digital, serta pemecahan masalah digital, dengan menyesuaikan konteks penggunaan *website* (Sukmawati, 2025). Pengukuran kemampuan digital selanjutnya diuji melalui uji validitas dan reliabilitas instrumen untuk memastikan bahwa setiap indikator mampu mengukur keterampilan digital secara konsisten dan berbeda dari literasi publik yang berfokus pada pemahaman hak informasi serta pengetahuan mahasiswa yang berfokus pada substansi pengelolaan keuangan. Kemampuan ini tidak hanya berkaitan dengan keterampilan mengoperasikan perangkat teknologi, tetapi juga mencakup kemampuan menelusuri sumber informasi yang relevan, menilai kredibilitas informasi, serta memahami penyajian data dalam format digital (Cahyadi, 2026).

Dalam konteks Akuntansi Keuangan Publik, kemampuan digital menjadi penting karena pemerintah daerah memanfaatkan website resmi untuk memublikasikan informasi mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), laporan keuangan, realisasi anggaran, dan pertanggungjawaban penggunaan dana publik. Mahasiswa yang memiliki kemampuan digital yang baik diharapkan dapat mengakses informasi tersebut secara efektif dan mengevaluasi keterbukaan informasi yang disediakan pemerintah daerah. Kemampuan digital berperan sebagai variabel moderasi yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara literasi publik dan pengetahuan mahasiswa dengan penilaian transparansi *website* pemerintah daerah. Mahasiswa yang memiliki literasi publik dan pengetahuan mengenai akuntansi sektor publik belum tentu dapat menilai transparansi secara optimal apabila mengalami kesulitan dalam menemukan atau memahami informasi yang tersedia secara digital. Sebaliknya, kemampuan digital yang memadai dapat membantu mahasiswa menerapkan pengetahuan yang dimiliki untuk mengevaluasi kelengkapan, kejelasan, kemutakhiran, dan kemudahan akses informasi pada *website* pemerintah daerah (Mabruri, 2026). Oleh karena itu, penelitian ini menguji apakah kemampuan digital memengaruhi kekuatan hubungan literasi publik dan pengetahuan mahasiswa terhadap penilaian transparansi *website* pemerintah daerah. Hasil pengujian

diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai peran keterampilan digital dalam mendukung pemanfaatan informasi publik serta penguatan transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah.



Gambar 1. Kerangka Penelitian.

Sumber: Penulis (2026).

Gambar 1 menjelaskan kerangka penelitian, jika dikaitkan dengan hipotesis penelitian ini adalah:

H1: Literasi Publik Berpengaruh Positif Terhadap Penilaian Transparansi *Website* Pemerintah Daerah

H2: Pengetahuan Mahasiswa Berpengaruh Positif Terhadap Penilaian Transparansi *Website* Pemerintah Daerah

H3: Literasi Publik Berpengaruh Positif Terhadap Penilaian Transparansi *Website* Pemerintah Daerah Dengan Kemampuan Digital Sebagai Pemoderasi

H4: Pengetahuan Mahasiswa Berpengaruh Positif Terhadap Penilaian Transparansi *Website* Pemerintah Daerah Dengan Kemampuan Digital Sebagai Pemoderasi

Literasi publik memegang peranan fundamental dalam membentuk pemahaman masyarakat mengenai hak-hak atas keterbukaan informasi publik dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Ketika individu memiliki tingkat literasi publik yang memadai, cenderung lebih peka terhadap pentingnya akses informasi serta mampu mengenali indikator-indikator transparansi yang seharusnya disajikan oleh instansi pemerintah melalui media digital, seperti *website* resmi daerah (Sunanta, D., & Nas, 2025).

H1: Literasi Publik Berpengaruh Positif Terhadap Penilaian Transparansi Website Pemerintah Daerah

Tingginya literasi publik akan mendorong masyarakat untuk melakukan penilaian yang lebih objektif, kritis, dan positif terhadap transparansi *website* pemerintah daerah. Masyarakat yang literat tidak hanya sekadar melihat tampilan antarmuka sebuah situs, tetapi mampu mengevaluasi ketersediaan data, kemudahan akses informasi kebijakan, anggaran, hingga pelayanan publik, sehingga memperkuat keyakinan bahwa *website* tersebut benar-benar mencerminkan keterbukaan institusi pemerintah (Azahra, 2026).

H2: Pengetahuan Mahasiswa Berpengaruh Positif Terhadap Penilaian Transparansi Website Pemerintah Daerah

Mahasiswa sebagai bagian dari kelompok intelektual masyarakat memiliki basis pengetahuan akademis, daya nalar kritis, serta pemahaman teoretis yang lebih mendalam mengenai sistem pemerintahan dan administrasi publik. Pengetahuan spesifik ini membekali mahasiswa dengan kerangka evaluasi yang lebih terstruktur dalam menilai kinerja lembaga publik, termasuk sejauh mana prinsip-prinsip transparansi diterapkan melalui platform digital pemerintah daerah. Dengan pengetahuan yang baik, mahasiswa dapat menganalisis substansi informasi yang disajikan di *website* pemerintah secara lebih komprehensif, rasional, dan mendalam. Kondisi ini mendasari asumsi bahwa semakin tinggi pengetahuan mahasiswa, semakin positif pula penilaian terhadap transparansi *website* pemerintah daerah, karena mampu melihat dan mengapresiasi esensi keterbukaan informasi secara substantif dan proporsional.

H3: Literasi Publik Berpengaruh Positif Terhadap Penilaian Transparansi Website Pemerintah Daerah Dengan Kemampuan Digital Sebagai Pemoderasi

Kemampuan digital mencakup keterampilan teknis dan fungsional dalam mengoperasikan perangkat teknologi serta memanfaatkan internet secara efektif, yang dalam penelitian ini diposisikan sebagai variabel pemoderasi. Variabel pemoderasi mengindikasikan bahwa kemampuan digital dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen (literasi publik) dan variabel dependen (penilaian transparansi), di mana kecakapan teknis menjadi jembatan operasional bagi literasi konseptual seseorang.

Ketika seseorang memiliki literasi publik yang tinggi dan didukung pula dengan kemampuan digital yang mumpuni, maka proses evaluasi terhadap *website* pemerintah daerah akan menjadi jauh lebih optimal. Individu tersebut tidak hanya paham secara teoretis mengenai pentingnya keterbukaan, tetapi juga terampil menavigasi menu, mencari dokumen transparansi, dan menilai fitur-fitur situs web dengan lancar, sehingga kemampuan digital diduga memperkuat pengaruh positif literasi publik terhadap penilaian transparansi *website*.

H4: Pengetahuan Mahasiswa Berpengaruh Positif Terhadap Penilaian Transparansi Website Pemerintah Daerah Dengan Kemampuan Digital Sebagai Pemoderasi

Pengetahuan mahasiswa yang bersifat konseptual dan analitis membutuhkan sarana operasional yang memadai agar dapat diaplikasikan secara maksimal dalam menilai platform digital seperti *website* pemerintah daerah. Di sinilah kemampuan digital berperan sebagai pemoderasi yang memperkuat pengaruh pengetahuan mahasiswa terhadap penilaian transparansi, karena kecakapan teknologi memungkinkan mengeksplorasi sistem informasi dengan lebih leluasa. Jika mahasiswa memiliki pengetahuan yang baik tentang tata kelola pemerintahan dan diimbangi dengan kemampuan digital yang tinggi, dapat secara efektif mengeksplorasi, memverifikasi, dan menguji fitur-fitur keterbukaan informasi secara mendalam tanpa terkendala hambatan teknis. Akibatnya, kemampuan digital ini akan memperkuat (memoderasi secara positif) dampak pengetahuan mahasiswa terhadap penilaian transparansi *website* pemerintah daerah karena aksesibilitas informasi digital dapat dimanfaatkan secara maksimal.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian eksplanatori, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen dan peran variabel moderasi. Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan analisis regresi linear berganda dan *Moderated Regression Analysis* (MRA) dengan memasukkan dua variabel interaksi, yaitu interaksi antara literasi publik dan kemampuan digital (X1×Z) serta interaksi antara pengetahuan mahasiswa dan kemampuan digital (X2×Z). Model regresi yang digunakan mencakup pengaruh langsung literasi publik dan pengetahuan mahasiswa terhadap penilaian transparansi *website* pemerintah daerah, serta pengaruh kedua variabel interaksi untuk mengetahui kemampuan digital dalam memperkuat atau memperlemah hubungan antarvariabel tersebut. Pengolahan dan pengujian data dilakukan menggunakan perangkat lunak Stata.

Penelitian ini berfokus pada pengaruh literasi publik dan pengetahuan mahasiswa terhadap penilaian transparansi *website* pemerintah daerah dengan kemampuan digital sebagai variabel moderasi. Pendekatan kuantitatif digunakan karena data penelitian diperoleh melalui pengukuran variabel menggunakan instrumen kuesioner dan dianalisis secara statistik untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Penelitian ini menggunakan data primer yang dikumpulkan secara langsung dari responden melalui penyebaran kuesioner. Pengumpulan

data dilakukan secara potong lintang *(cross-sectional)*, yaitu pada satu periode pengamatan tertentu.

Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa perguruan tinggi di wilayah Jabodetabek yang berpotensi menggunakan *website* pemerintah daerah sebagai sumber informasi publik. Pengisian oleh responden menggunakan penyebaran kuesioner secara daring *(google formulir)* kepada mahasiswa aktif dari berbagai perguruan tinggi di Jabodetabek sebanyak 84 responden, PTN dan swasta seama 4 bulan (Juni-September 2026). Kriteria inklusi dalam penelitian ini mencakup mahasiswa aktif sarjana yang memiliki pengalaman mengakses *website* pemerintah daerah atau bersedia melakukan evaluasi berdasarkan *website* dan petunjuk penilaian yang diberikan, sedangkan responden yang tidak memenuhi kriteria atau tidak mengisi kuesioner secara lengkap dikeluarkan dari sampel penelitian. Sebelum mengisi kuesioner, responden diberikan penjelasan mengenai tujuan penelitian, sifat partisipasi yang sukarela, serta jaminan kerahasiaan identitas dan data yang diberikan, sehingga informasi yang diperoleh hanya digunakan untuk kepentingan akademik.

Sampel penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan responden berdasarkan kriteria yang sesuai dengan tujuan penelitian. Kriteria responden meliputi mahasiswa aktif pada jenjang diploma atau sarjana, memiliki pengalaman mengakses *website* resmi pemerintah daerah atau bersedia melakukan penilaian terhadap *website* tersebut, serta bersedia mengisi kuesioner secara lengkap. Mahasiswa yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi, administrasi publik, ekonomi, atau bidang lain yang relevan dapat menjadi responden penelitian. Penentuan jumlah sampel dilakukan dengan mempertimbangkan jumlah indikator pengukuran, kompleksitas model penelitian, dan kebutuhan analisis regresi moderasi. Responden sebanyak 84 orang kepada mahasiswa yang memenuhi kriteria sampel, sehingga rumusan penelitian adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 Z + \beta_4 (X_1 * Z) + \beta_5 (X_{2*} Z) + \varepsilon it \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots (1)$$

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Gender.

Gender	**Jumlah**
Laki-laki	35
Perempuan	49
Total	84

Sumber: Diolah (2026).

Tabel 1 menyajikan distribusi gender dari total 84 responden, yang terdiri dari 35 orang laki-laki (sekitar 41,67%) dan 49 orang perempuan (sekitar 58,33%). Data ini menunjukkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini berjenis kelamin perempuan.

Tabel 2. Mahasiswa.

Semester	Jumlah
1-3	26
4-6	30
7-8	28
Total	84

Sumber: Diolah (2026).

Tabel 2 menjelaskan distribusi tingkat semester dari total 84 responden mahasiswa. Mahasiswa yang menjadi sampel hanya mahasiswa level Sarjana (S1) saja. Berdasarkan data yang tercantum, kelompok mahasiswa semester 1–3 berjumlah 26 orang (sekitar 30,95%), kelompok semester 4–6 berjumlah 30 orang (sekitar 35,71%), dan kelompok semester 7–8 berjumlah 28 orang (sekitar 33,33%). Secara keseluruhan, distribusi responden tergolong cukup merata di setiap tingkatan semester, dengan kelompok mahasiswa semester 4–6 menjadi jumlah terbanyak dalam penelitian ini.

Tabel 3. Lokasi (Tempat Tinggal).

Lokasi	Jumlah
Jakarta	23
Bogor	13
Depok	7
Tangerang	38
Bekasi	3
Total	84

Sumber: Diolah (2026).

Tabel 3 menyajikan distribusi lokasi (tempat tinggal) dari total 84 responden yang tersebar di wilayah Jabodetabek. Rincian jumlah responden berdasarkan tempat tinggalnya mencakup Tangerang sebanyak 38 orang (sekitar 45,24%), Jakarta sebanyak 23 orang (sekitar 27,38%), Bogor sebanyak 13 orang (sekitar 15,48%), Depok sebanyak 7 orang (sekitar 8,33%), dan Bekasi sebanyak 3 orang (sekitar 3,57%). Secara keseluruhan, data menunjukkan bahwa responden yang berdomisili di Tangerang merupakan kelompok terbesar dalam penelitian ini, disusul oleh responden asal Jakarta. Sementara itu, wilayah Bekasi menjadi area tempat tinggal dengan jumlah responden paling sedikit.

Tabel 4. Statistik Deskriptif

Var.	Mean	Std. Dev	Min	Max
X1	3.693	0.470	2.636	3.687
X2	3.725	0.405	2.655	3.777
Z	3.699	0.432	2.812	3.699
Y	3.821	0.341	3.075	3.812

Sumber: Diolah (2026).

Tabel 4 menyajikan hasil analisis statistik deskriptif untuk beberapa variabel penelitian, yaitu variabel X1, X2, Z, dan Y, yang mencakup nilai rata-rata (mean), standar deviasi (std. dev), nilai minimum (min), serta nilai maksimum (max). Secara keseluruhan, tabel ini memberikan gambaran umum mengenai karakteristik persebaran data dari masing-masing variabel penelitian yang digunakan. Variabel X1 menunjukkan tingkat variasi data yang cukup beragam dengan rentang nilai dari 2.636 hingga 3.687. Variabel X2 merepresentasikan kecenderungan nilai yang relatif tinggi dan stabil dengan rata-rata mencapai 3.725. Variabel Z memiliki karakteristik persebaran data yang berada di kisaran tengah dengan tingkat penyimpangan atau standar deviasi sebesar 0.432. Variabel Y menunjukkan pencapaian nilai rata-rata tertinggi di antara variabel lainnya yaitu sebesar 3.821, yang mengindikasikan bahwa sebagian besar data terkonsentrasi pada angka yang tinggi dengan tingkat keragaman yang paling kecil.

Tabel 5. *Result*.

Var.	B	Std. Err	t	Sig.	Hyp.
Y	3.802	0.027	139.696	0.000	
X1	0.336	0.058	5.805	0.000	H1 (+)
X2	0.236	0.068	3.476	0.001	H2 (+)
Z	0.165	0.064	2.580	0.012	
X1*Z	0.519	0.144	3.600	0.001	H3 (+)
X2*Z	0.486	0.157	3.089	0.003	H4 (+)

Sumber: Diolah (2026).

Tabel 5 menyajikan hasil analisis regresi atau pengujian hipotesis yang melibatkan variabel dependen Y, variabel independen X1 dan X2, serta variabel pemoderasi Z beserta interaksinya.. Nilai konstanta atau variabel Y tercatat memiliki koefisien B sebesar 3,802 dengan standar error 0,027, nilai t sebesar 139,696, dan tingkat signifikansi 0,000. Selanjutnya, pada pengujian variabel independen pertama (X1) terhadap Y, diperoleh koefisien B sebesar 0,336, standar error 0,058, nilai t hitung sebesar 5,805, dan nilai signifikansi 0,000. Berdasarkan hasil tersebut, hipotesis pertama (H1) yang bernilai positif dinyatakan didukung karena nilai signifikansinya berada jauh di bawah ambang batas umum (0,000 < 0,05). Begitu pula dengan variabel independen kedua (X2), yang menunjukkan koefisien B sebesar 0,236, standar error 0,068, nilai t sebesar 3,476, dan nilai signifikansi 0,001. Meskipun hasil pengujian menunjukkan hubungan positif dan signifikan secara statistik, interpretasi terhadap hasil penelitian perlu dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan konsistensi jumlah sampel (n), statistik deskriptif, dan output regresi yang digunakan dalam analisis. Oleh karena itu, sebelum menetapkan dukungan terhadap hipotesis penelitian, perlu dilakukan verifikasi kembali terhadap keseluruhan data dan hasil pengujian, termasuk kesesuaian pada setiap model regresi. Selanjutnya, hasil ini juga mendukung hipotesis kedua (H2) yang bernilai positif

secara statistik. Tabel ini juga menyajikan hasil untuk variabel pemoderasi Z secara langsung yang memiliki nilai koefisien B sebesar 0,165, standar error 0,064, nilai t sebesar 2,580, dan nilai signifikansi 0,012. Di samping itu, interaksi antara variabel pertama dan pemoderasi (X1*Z) menghasilkan koefisien B sebesar 0,519 dengan standar error 0,144, nilai t sebesar 3,600, serta signifikansi 0,001.

Temuan ini memperkuat hipotesis ketiga (H3) yang menunjukkan adanya pengaruh positif dari interaksi tersebut. Terakhir, interaksi antara variabel kedua dan pemoderasi (X2*Z) mencatatkan nilai koefisien B sebesar 0,486, standar error 0,157, nilai t sebesar 3,089, dan tingkat signifikansi 0,003. Nilai signifikansi yang kecil ini mengonfirmasi bahwa hipotesis keempat (H4) yang bernilai positif juga diterima. Secara keseluruhan, seluruh variabel independen maupun variabel interaksi dalam tabel ini terbukti signifikan secara statistik dalam mempengaruhi variabel dependen Y. Hal ini membuktikan bahwa semua hipotesis diterima, sesuai dengan penelitian sebelumnya

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh literasi publik dan pengetahuan mahasiswa terhadap penilaian transparansi *website* pemerintah daerah dengan kemampuan digital sebagai variabel moderasi. Penelitian ini berfokus pada pentingnya pemahaman masyarakat, khususnya mahasiswa, dalam menilai keterbukaan informasi yang disediakan oleh pemerintah daerah melalui media digital. Transparansi *website* pemerintah daerah menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung akuntabilitas publik, karena masyarakat dapat mengakses informasi mengenai kebijakan, program, anggaran, dan laporan keuangan pemerintah secara lebih mudah. Dengan demikian, penilaian transparansi tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan informasi, tetapi juga oleh kemampuan pengguna dalam memahami dan mengevaluasi informasi tersebut. Hasil ini mendukung pada semua hipotesis sebelumnya. Pengetahuan mahasiswa berkaitan dengan pemahaman terhadap informasi publik, karakteristik informasi yang transparan, serta hak masyarakat dalam memperoleh informasi dari badan publik. Hasil ini secara konseptual berpotensi memengaruhi penilaian mahasiswa terhadap transparansi *website* pemerintah daerah. Namun, kesimpulan mengenai arah dan signifikansi pengaruh masing-masing variabel harus didasarkan pada hasil pengujian statistik yang diperoleh, sehingga tidak dapat dinyatakan secara pasti tanpa mengacu pada hasil penelitian empiris.

Kemampuan digital berperan sebagai variabel moderasi yang secara konseptual dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara literasi publik dan pengetahuan mahasiswa

dengan penilaian transparansi *website* pemerintah daerah. Secara empiris, peran moderasi kemampuan digital ditentukan berdasarkan arah dan tingkat signifikansi koefisien regresi dari masing-masing variabel interaksi, yaitu literasi publik dengan kemampuan digital (X1×Z) serta pengetahuan mahasiswa dengan kemampuan digital (X2×Z). Koefisien interaksi yang bernilai positif dan signifikan menunjukkan bahwa kemampuan digital memperkuat hubungan positif antara variabel independen dan penilaian transparansi *website* pemerintah daerah, sedangkan koefisien negatif dan signifikan menunjukkan bahwa kemampuan digital memperlemah hubungan tersebut. Dengan demikian, kesimpulan pengujian hipotesis H3 dan H4 didasarkan pada hasil empiris kedua koefisien interaksi tersebut, bukan hanya pada hubungan konseptual antar variabel.

Mahasiswa yang memiliki kemampuan digital memadai diharapkan lebih mampu menelusuri, mengakses, membandingkan, dan mengevaluasi informasi yang tersedia pada *website* pemerintah daerah. Meskipun demikian, kemampuan digital yang tinggi tidak secara otomatis menjamin bahwa mahasiswa akan memberikan penilaian transparansi yang lebih baik, karena penilaian tersebut juga dapat dipengaruhi oleh kelengkapan, keakuratan, kemutakhiran, dan kemudahan akses informasi yang disediakan pemerintah daerah. Oleh karena itu, peran moderasi kemampuan digital perlu disimpulkan berdasarkan hasil pengujian interaksi antarvariabel dalam model penelitian. Berdasarkan implikasi penelitian, pemerintah daerah disarankan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan *website* resmi melalui penyediaan informasi yang lengkap, akurat, relevan, mutakhir, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Penyajian informasi anggaran, laporan keuangan, realisasi program, serta informasi pelayanan publik perlu dilakukan secara sistematis dan didukung oleh desain *website* yang mudah diakses melalui berbagai perangkat digital. Perguruan tinggi juga dapat berkontribusi dengan meningkatkan literasi publik dan pengetahuan mahasiswa mengenai keterbukaan informasi, akuntabilitas pemerintah, serta hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik. Selain itu, penguatan kemampuan digital mahasiswa perlu diarahkan tidak hanya pada keterampilan teknis menggunakan teknologi, tetapi juga pada kemampuan mengevaluasi kredibilitas, kelengkapan, dan relevansi informasi yang diperoleh melalui *website* pemerintah daerah.

Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu (1) penelitian ini menggunakan teknik nonprobability sampling dengan pendekatan purposive sampling, sehingga responden yang terlibat, khususnya mahasiswa dari wilayah Jabodetabek, belum sepenuhnya merepresentasikan karakteristik seluruh mahasiswa perguruan tinggi di Indonesia, (2) penggunaan kuesioner sebagai instrumen pengumpulan data berpotensi menimbulkan common-method bias, karena pengukuran variabel independen, variabel dependen, dan

variabel moderasi diperoleh dari sumber responden yang sama, (3) penelitian menggunakan desain cross-sectional yang hanya menggambarkan hubungan antarvariabel pada satu periode pengamatan, sehingga belum dapat menjelaskan perubahan hubungan antarvariabel dari waktu ke waktu maupun membuktikan hubungan sebab-akibat secara langsung. Penilaian responden terhadap transparansi *website* dapat bersifat subjektif dan belum tentu sepenuhnya mencerminkan tingkat transparansi aktual dari masing-masing pemerintah daerah. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan responden, melibatkan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi dan wilayah, serta mengombinasikan data kuesioner dengan penilaian langsung terhadap konten *website* pemerintah daerah menggunakan indikator transparansi yang terukur. Penelitian mendatang juga dapat mempertimbangkan variabel lain, seperti kepercayaan publik, pengalaman penggunaan *website*, persepsi kemudahan akses, dan kualitas informasi, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penilaian transparansi *website* pemerintah daerah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada responden penelitian. Pendanaan penelitian pribadi (mandiri) dari penulis.

DAFTAR REFERENSI

Aji, P. &. (2025). Transformasi Digital dalam Pelayanan Publik: Analisis Implementasi Aplikasi PRO Denpasar Sebagai Model E-Government di Indonesia. *Public Service and Governance Journal*, *6*(1), 255–270.

Arjang & Kraugusteeliana. (2025). Mengakselerasi Daya Saing UMKM melalui Inovasi Teknologi: Peran Strategis Literasi Digital Masyarakat dalam Mewujudkan Ekosistem Ekonomi Berbasis Platform. *Jurnal Minfo Polgan*, *14*(2), 1608–1618. https://doi.org/10.33395/jmp.v14i2.15190

Azahra, K. &. (2026). Uji Publik sebagai Instrumen Demokrasi Partisipatif dalam Pembentukan Perundang-Undangan: Kajian atas Efektivitasnya di Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, *12*(6), 27–41.

Cahyadi, R. &. (2026). IMPLEMENTASI SITUS WEB JAKPRENENUR DALAM RANGKA INOVASI PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA. *Decision: Jurnal Administrasi Publik*, *7*(2), 45–61.

Daud, S. & D. (2026). Financial Independence, Accountability, Transparency, and Their Influence on Local Government Corruption in Sumatra Provinces. *Owner : Riset Dan Jurnal Akuntansi*, *10*(1), 285–300.

Faujiah, A. (2025). Penguatan Manajemen Wakaf melalui Pengembangan SDM Profesional dan Literasi Masyarakat di Era Digital. *Journal of Islamic Economics Studies and Practices*, *4*(2), 125–138.

Imansyah, F. (2025). MEWUJUDKAN MASYARAKAT MELEK DIGITAL: STRATEGI, TANTANGAN, DAN IMPLEMENTASI PROGRAM LITERASI DI LINGKUNGAN KOMUNITAS. *Jurnal Abdi Insani*, *12*(6), 2605–2618.

Irawaty, A. &. (2025). Peningkatan Kapasitas Literasi Digital Masyarakat Desa melalui Pelatihan Teknologi Informasi sebagai Strategi Penguatan Kemandirian dan Akses Informasi di Era Digital. *Daya Karya: Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, *1*(1), 1–11. https://doi.org/10.65508/4w3jbq07

Mabruri, S. & H. (2026). Pengembangan Data Desa melalui Program Desa Cengkir dalam Angka dalam Mendukung Transparansi dan Aksesibilitas Informasi. *Jurnal Pengabdian Masyarakat - PIMAS*, *5*(2), 264–271.

Mujiyani, & Safitri, P. N. (2025). Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah dan realisasi APBD Provinsi Banten periode 2017–2023. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen Bisnis, 5*(2), 12–17. https://doi.org/10.56127/jaman.v5i02.2217

Nadila et al. (2026). Pelatihan dan Pendampingan Penanganan Aduan Masyarakat bagi Mahasiswa sebagai Agen Transparansi dalam Mendukung Pelayanan Penyidik Reskrimum Polda Sulawesi Tengah. *Tongkonan: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *5*(1), 69–79.

Ni'mah, N., Fabriar, S. R., Fitri, A. N., & Pangestu, A. C. (2026). Peningkatan Literasi Digital Masyarakat dalam Pemanfaatan Media Digital untuk Informasi dan Promosi. *ADMA : Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, *6*(2), 257–272.

Prakasa & Darmawan. (2025). OPTIMALISASI KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DESA BUBUNAN DALAM PENYAMPAIAN INFORMASI KEPADA MASYARAKAT MENGGUNAKAN WEBSITE. *Maha Widya Duta : Jurnal Penerangan Agama, Pariwisata Budaya, Dan Ilmu Komunikasi*, *9*(1), 62–71.

Rochmanto & Utami. (2026). Pelatihan Pengelolaan Website Desa bagi Perangkat Desa dan Kader Desa Grogol Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo. *Jnanadharma*, *4*(01), 110–119.

Samsinar & Saputri. (2025). PEMBERDAYAAN KADER RT MELALUI LITERASI DIGITAL DAN PEMANFAATAN IT UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DI DESA WANAGIRI, KECAMATAN SAKETI, PANDEGLANG. *Jurnal Abdi Insani*, *12*(12), 7067–7076.

Saputra & Korompot, R. A. (2026). THE ROLE OF DIGITAL TRANSPARENCY IN IMPROVING PUBLIC ACCOUNTABILITY: A STUDY OF PUBLIC INFORMATION MANAGEMENT ON OFFICIAL LOCAL GOVERNMENT WEBSITES. *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah (JKPD)*, *10*(1), 65–77.

Setiabuyung & Bertho. (2025). Persepsi Mahasiswa Terhadap Keterbukaan Informasi Mengenai Media Sosial Instagram @Fisipupr Pada Jurusan Administrasi Negara. *Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, *12*(2), 755–766.

Subhan, A., Kurnia, & T. (2026). Evaluasi Implementasi Sistem Digital Pemerintahan dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Pemerintah Daerah Indonesia. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, *4*(3), 10180–10197.

Sukmawati, R. &. (2025). EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI APLIKASI LAYANAN PUBLIK BERBASIS DIGITAL (MAKASSAR SMART CITY) DALAM MENINGKATKAN KEPUASAN MASYARAKAT. *Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, *11*(4), 1352–1375.

Sunanta, D., & Nas, Z. (2025). KETERBUKAAN INFORMASI ALOKASI DANA PEMBANGUNAN ALUN-ALUN SERDANG BEDAGAI PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS)*, *7*(1), 135–154.

Vike, F. & F. (2026). Analisis Penerapan Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengawasan APBD di Kota Malang. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, *4*(3), 5956–5964.

Wibowo. (2026). Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Serta Literasi Digital sebagai Landasan Etika Pengembangan Ilmu Pengetahuan Berkelanjutan di Era Revolusi Industri 4.0 dan Era Society 5.0. *Entita: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Ilmu-Ilmu Sosial*, *2*(2), 331–344.

Yulianto & Muqsith. (2026). Sosialisasi Regulasi Smart Province Dalam Penyusunan Kebijakan Pelayanan Publik Digital Di Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. *GUNAVATTA : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *2*(2), 106–119.